

BAB II

KONDISI SOSIAL DAN POLITIK KASUNANAN SURAKARTA SERTA KADIPATEN MANGKUNEGARAN MENJELANG KEMERDEKAAN HINGGA TERBENTUKNYA DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA

2.1 Kondisi Sosial

2.1.1 Kasunanan Surakarta

A. Stratifikasi Sosial Kasunanan Surakarta

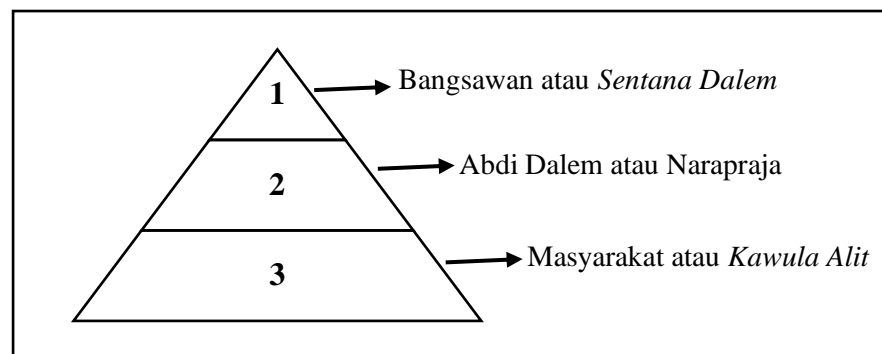
Kasunanan Surakarta merupakan sebuah wilayah swapraja yang bertahan hingga masa revolusi. Sejak zaman Hindia Belanda, wilayah Kasunanan Surakarta disebut sebagai *Vorstenlanden*.²² Posisi yang demikian juga berlanjut hingga masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Kasunanan Surakarta dikukuhkan sebagai *Kochi* dengan kepala pemerintahan yang menjabat diberi gelar *Koo* serta stratifikasi sosial dibelakangnya.²³

Stratifikasi sosial merupakan perbedaan tatanan masyarakat yang dikelompokkan kedalam tingkatan-tingkatan kelas. Secara sederhana, kelas-kelas dalam pengelompokan diwujudkan melalui kelas tinggi,

²² *Vorstenlanden* merupakan suatu istilah penyebutan terhadap suatu wilayah yang memiliki pemerintahan independen dengan mempertahankan adat dan budayanya. Secara lebih spesifik, pemerintah Kolonial Hindia Belanda menyebut *Vorstenlanden* untuk wilayah pemerintahan Kerajaan Jawa (Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman) dibahas dalam Djoko Suryo. *Dari Vorstenlanden ke DIY: Kesenambungan dan Perubahan*. (Konferensi Nasional Sejarah IX, 5-7 Juli 2011, hlm. 3).

²³ Surakarta dijadikan daerah istimewa saat pendudukan Jepang berlangsung serta melatarbelakangi penyebutan Surakarta *Koo* dengan Pemerintahan Surakarta menjadi *Kooti Sumotyookan* tersedia dalam <https://surakarta.go.id/?p=26023>. Diakses pada 9 Januari 2024 pukul 11.09 WIB.

kelas sedang, dan kelas rendah.²⁴ Kasunanan Surakarta sebagai wilayah swapraja yang independen memperoleh hak-hak sosial lebih tinggi. Stratifikasi sosial yang kemudian lebih familier dikenal dengan struktur sosial, mengelompokkan kelas masyarakat kedalam beberapa kelas.



Gambar 2. 1 Segitiga Sosial Kasunanan Surakarta ²⁵

Struktur sosial masyarakat Kasunanan Surakarta secara garis besar terdiri dari tiga kelompok masyarakat. Golongan tertinggi ditempati oleh kelompok bangsawan atau *sentana dalem*.²⁶ Kelompok tingkatan *sentana dalem* dapat dikatakan menduduki pucuk sosial dengan segala hak dan kewajiban yang menyertainya. Selanjutnya, kelompok penengah diisi oleh sekumpulan masyarakat yang mengabdikan diri terhadap Kasunanan Surakarta atau lebih dikenal

²⁴ Faktor-faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial ditentukan oleh kekayaan, kekuasaan bahkan kehormatan. Lihat Binti Maunah, Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan. (*Jurnal Ta'allum*: Vol 2, No 1, 2015), hlm. 31-33.

²⁵ Wawancara Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

²⁶ *Sentana dalem* adalah hubungan kekerabatan darah atau keturunan dari setiap raja yang memerintah. Terdiri atas raja, permaisuri, anak, cucu, cicit, canggah dan *wareng*. Tingkatan setelah *wareng* tidak lagi diperbolehkan masuk kedalam *sentana dalem* melainkan turun menjadi rakyat biasa (*kawula alit*). Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

dengan abdi dalem (narapraja). Tingkatan golongan ketiga dalam susunan struktur sosial masyarakat Kasunanan Surakarta adalah golongan bawah yang terdiri atas masyarakat atau *kawula alit*.²⁷

Kondisi sosial yang demikian, turut mewarnai kehidupan bermasyarakat di Kasunanan Surakarta. Pada satu sisi, kelompok masyarakat atas yang meliputi para *sentana dalem* mempunyai kekuatan dan dianggap sebagai pihak eksklusif, adiluhung, aristokrat serta agung.²⁸ Dipihak lain, kelompok sosial abdi dalem dianggap sebagai penengah karena tugasnya sebagai pelaksana aparatur sipil dan militer Kasunanan Surakarta.²⁹ Sedangkan, *kawula alit* yang sebagian besar hidupnya diluar *kutanegara* atau *kuthagara*³⁰ memiliki kebudayaan sendiri dan dianggap lebih terbuka, polos, berselera rendah bahkan tak jarang didefinisikan urakan.³¹ Masing-masing dari ketiga kelompok sosial tersebut menempati kedudukan politik dan budaya yang berbeda-beda sesuai tupoksinya.

²⁷ *Kawula alit* adalah sebutan bagi masyarakat biasa yang terdiri atas petani, buruh, nelayan, pengrajin dan sebagainya. Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

²⁸ Julianto Ibrahim. *Kraton Surakarta & Gerakan Anti Swapraja*. (Yogyakarta: Malioboro Press, 2008), hlm. 45-46.

²⁹ Kelompok sosial narapraja atau abdi dalem juga dianggap sebagai priyayi cilik. Disamping itu, posisi Kyai (ulama) di Kasunanan Surakarta memiliki peranan sosial tinggi sebagai pendidik agama islam sekaligus penasihat raja bahkan berhak dikategorikan elite. *Ibid.*,

³⁰ *Kutanegara* atau *Kutagara* didirikan untuk wilayah tempat tinggal Bangsawan (Priayi) dibahas dalam Supriadi, *Kyai dan Priyayi di Masa Transisi*. (Surakarta: Yayasan Pustaka Cakra, 2001), hlm. 67-68.

³¹ Urakan adalah bentuk respon masyarakat yang tidak menyukai aturan yang ketat. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1596.

Kedudukan kelompok bangsawan (*sentana dalem*) selaku pengemban budaya agung diantara kedua kelompok sosial lainnya mengalami perincian kelas sosial lagi. Raja sebagai penguasa tertinggi dan absolut menempati lapisan pertama dalam kelas sosial Bangsawan disusul permaisuri dan putra-putrinya. Permaisuri yang lebih dikenal dengan Prameswari Dalem mempunyai hak lebih daripada Garwa Ampeyan.³² Perbedaan status seperti ini berimbas pula kepada keturunan yang mereka lahirkan.

Kedudukan anak Prameswari Dalem dan anak Garwa Ampeyan terdapat perbedaan hak dan kewajiban. Meskipun demikian, perlakuan terhadap anak Prameswari Dalem dan Garwa Ampeyan berlaku sama diperlakukan sebagai anak raja. Masing-masing keturunan raja harus dihormati oleh abdi dalem dan *kawula alit*.

Kasunanan Surakarta secara turun temurun juga memberikan gelar tambahan kepada para kerabat raja.³³ Beberapa contoh gelar yang diberikan raja kepada kerabat-kerabatnya di dalam lingkup *sentana dalem*, yakni sebagai berikut.

1. Anak putra dari seorang Prameswari Dalem sewaktu kecil berhak memperoleh gelar *Raden Mas Gusti* (RMG) dan diperbaharui ketika beranjak dewasa menjadi *Kanjeng Gusti Pangeran* (KGP).

³² Garwa Ampeyan atau Garwa Ampil adalah sebutan bagi seorang selir raja. Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939* (Yogyakarta: Tamansiswa, 1989), hlm. 58.

³³ Gelar yang disandang nantinya digunakan masyarakat untuk membedakan apakah seseorang keturunan raja dari *Prameswari Dalem* atau hanya anak dari *Garwa Ampeyan*. Hal tersebut berpengaruh pula terhadap derajat ketinggian *sentana dalem*. *Ibid.*,

Selain gelar, anak-anak raja tersebut juga mendapatkan tambahan julukan seperti *purbaya*, *mangkubumi*, *puger* dan lainnya. Sesuai sabda raja, terkadang anak-anak Garwa Ampeyan tetap berhak mendapatkan gelar dan predikat itu.

2. Putri raja yang lahir dari Prameswari Dalem pada saat kecil berhak menyandang panggilan *Gusti Raden Ayu* (GRAy) yang berubah menjadi *Gusti Kanjeng Ratu* (GKR) apabila putri raja telah berumah tangga. Sedari lahir, putri raja diberi nama *bendara*, *angger*, *timur* dan *maduretna* sesuai urutan kelahiran. Disamping itu, putri raja yang lahir dari Garwa Ampeyan tetap memperoleh predikat walaupun berbeda dengan anak permaisuri. Putri Garwa Ampeyan mendapatkan gelar *Bendara Raden Ajeng* (BRAj) dan berubah menjadi *Bendara Raden Ayu* (BRAy) jikalau sudah menikah.
3. Lapisan sosial selanjutnya ditempati oleh orang-orang biasa dari kalangan *abdi dalem* dan *kawula alit* yang diangkat menjadi bagian *sentana dalem*. Pengangkatan semacam ini boleh dilakukan kepada siapa saja yang dianggap telah berjasa kepada Kasunanan Surakarta berdasarkan pertimbangan raja.³⁴

³⁴ Orang-orang yang diangkat raja menjadi *sentana dalem* disebut *Pangeran Sengkan*. Para menantu raja yang sedang memerintah juga berhak menyandang gelar ini. Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

B. Sistem Birokrasi Kasunanan Surakarta

Gelar yang disandang raja tersebut menurut *paugeran* hanya berhak diperoleh anak laki-laki tertua dari seorang Prameswari Dalem.³⁵ Dalam beberapa kondisi, anak seorang Garwa Ampeyan juga diperkenankan naik tahta menjadi raja apabila Prameswari Dalem tak memiliki anak laki laki.

Posisi dan kedudukan Paku Buwono di Kasunanan Surakarta diperkuat lewat doktrin *Keagungbintaraan* dan *Manunggaling Kawula Gusti* yang dianut. Konsep *Keagungbintaraan* dapat diartikan sebagai kepercayaan bahwa seorang raja merupakan penguasa, serta pemilik semua aspek yang ada dalam cangkupan daerahnya.³⁶

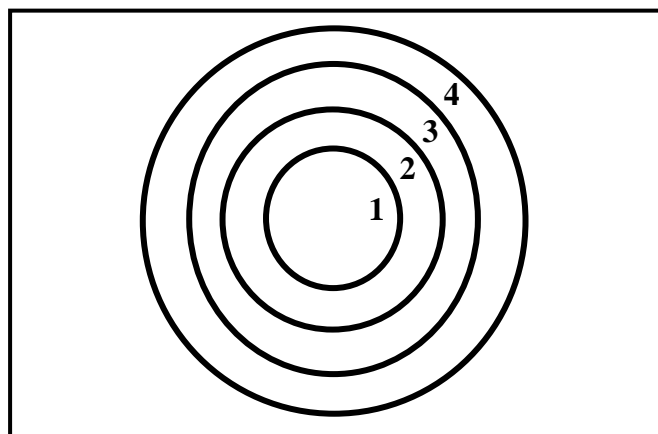
Penegasan itu kembali dilakukan lewat konsep *Manunggaling Kawula Gusti* dengan semua komponen negara baik penguasa maupun rakyat yang diperintah harus melakukan hubungan timbal balik. Selain itu di dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Raja dipandang selain sebagai pemimpin negara juga sekaligus penguasa religius-magis.³⁷ Dalam pengimplementasiannya, *kawula alit* sebagai lapisan sosial bawah akan selalu berusaha untuk patuh dan mengikuti aturan yang dibuat raja. Sedangkan raja harus mampu mengayomi dan memberikan

³⁵ Kasunanan Surakarta sebagai penerus trah Mataram Islam berpaku pada aturan-aturan yang disusun Sultan Agung. Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

³⁶ Raja dalam memimpin harus memiliki karakter “*Berbudi Bawa Laksana, Ambeg Adil Paramartha dan Wenang Wisesa Sangari*”. G Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa dan Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 87.

³⁷ Wawancara dengan Bambang Sugiarto, tanggal 27 Desember 2023 di Kompleks Baluwarti Keraton Kasunanan Surakarta.

rasa aman kepada rakyatnya.³⁸ Kekuasaan mutlak yang dimiliki raja membuat raja berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai yang membantunya. Raja mengatur struktur dan jalannya birokrasi dengan pembagian-pembagian tertentu sebagai pelimpahan instruksi raja. Sejalan dengan hal tersebut, Kasunanan Surakarta membagi wilayah kekuasaannya kedalam empat lingkaran konsentris meliputi: *kuthagara, negaragung, mancanegara* serta *pasisiran*.³⁹



Gambar 2. 2 Lingkaran Konsentris Kasunanan Surakarta⁴⁰

Keterangan:

- 1 : Kuthagara
- 2 : Negaragung
- 3 : Mancanegara
- 4 : Pasisiran

³⁸ *Kawula alit* (rakyat biasa) dianggap hal penting dalam tatanan bernegara. Rakyat merupakan pendukung mutlak kekuasaan seorang raja. Tanpa sokongan rakyat kepada raja, dapat menyebabkan hilangnya kewibawaan pemimpin. Bentuk kepatuhan rakyat ditunjukkan lewat bayar upeti (pajak) dibahas lebih lanjut dalam Sri Margana, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 253-288.

³⁹ Pembagian wilayah semacam ini dikenal dengan lingkaran konsentris dan dilakukan sejak era Mataram Islam. Kasunanan Surakarta meneruskan pengklasteran wilayah disesuaikan dengan tingkatan sosial, kedudukan birokrasi dan budaya. Selo Soemarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Jakarta: Gratifi Press, 1986), hlm. 13-15.

⁴⁰ Denny Winata dan Indri Astrina, Implementation of Centrality Concept on Keraton Surakarta Hadiningrat. (*Jurnal Riset Arsitektur*: Vol 6, No 3, 2022), hlm. 318-319.

Kuthagara dipilih sebagai jantung pemerintahan, sekaligus tempat tinggal para *sentana dalem*. Lingkaran konsentris kedua disebut *negaragung*, wilayah ini adalah daerah tempat tinggal para priyayi dengan jabatan tinggi dan terdiri atas beberapa desa. Wilayah *negaragung* masih termasuk daerah inti kerajaan walaupun bukan *central government*, hal itu dikarenakan banyak terdapat tanah-tanah lungguh yang diambil dari tanah raja. *Mancanegara* dan *pasisiran* menempati lingkaran konsentris selanjutnya. Wilayah ini merupakan bagian terjauh dari *kuthagara* serta tidak memiliki tanah lungguh.⁴¹ Namun di beberapa kesempatan juga diharuskan menyerahkan upeti.⁴² Selanjutnya, Kasunanan Surakarta mengalami dua sistem birokrasi dan beberapa pembaharuan-pembaharuan, meliputi:

1. Sistem birokrasi tradisional sebelum Paku Buwono X

Struktur birokrasi Kasunanan Surakarta berjalan secara turun temurun. Pembagiannya terdiri atas tiga lembaga administrasi yang meliputi (*Reh Kepatihan*, *Reh Kadipaten Anom* dan *Reh*

⁴¹ Tanah lungguh atau *bengkok* adalah penyebutan bagi tanah-tanah yang diberikan raja kepada pegawai kerajaan di wilayah *negaragung*. Tanah lungguh tersebut diberikan sementara sebagai pengganti gaji yang disesuaikan dengan jabatannya (*siti gadhuan*). Di beberapa kondisi tertentu, para pemegang tanah lungguh tersebut juga berhak menyewakan tanah itu kepada pihak lain. Pada perkembangannya, sistem tanah lungguh dihapus secara keseluruhan tahun 1918 dan diganti sistem perangkat desa. Sebagai terima kasih, Kasunanan Surakarta memberikan tanah *pituwas* kepada para Bekel untuk simpanan masa pensiun dibahas dalam Suhartono. Apanage dan Bekel Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 27-29 dan Bram Setiadi, dkk., *Raja di Alam Republik Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2001), hlm. 215.

⁴² Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

Pengulon).⁴³ Secara umum, fungsi masing-masing lembaga tersebut yakni sebagai perpanjangan tangan raja.

Reh Kepatihan adalah lembaga administrasi Kasunanan Surakarta dibidang politik, pemerintahan dan militer yang dilimpahkan kepada seorang Patih. Secara fungsional, seorang patih dibantu *Bupati Nayaka* yang terdiri dari empat *Bupati Lebet* dan Empat *Bupati Jawi*.⁴⁴

Reh Kadipaten Anom merupakan lembaga yang mengurus segala keperluan di *Kuthagara*. *Pangeran Adipati Anom* selaku penanggung jawab lembaga ini juga diwajibkan memenuhi segala kebutuhan para *sentana dalem*.

Reh Pengulon adalah lembaga milik Kasunanan Surakarta yang menaungi urusan keagamaan. Semua aktivitas dan tugas agama, Raja limpahkan kepada pegawai-pegawai *Reh Pengulon*. Beberapa elemen-elemen *Reh Pengulon* meliputi: *Abdi Dalem Suronoto, Penghulu, Muadzin, Marbot dan Ulama*.⁴⁵

⁴³ *Reh Kepatihan* juga dikenal dengan *Reh Kepradatan*. Lihat dalam Novida Abbas, Organisasi Kemiliteran Pada Masa Pengaruh Islam dan Kolonial di Jawa. (*Jurnal Berkala Arkeologi*: Vol 27, No 2, 2007), hlm. 36.

⁴⁴ *Bupati Lebet* bertugas mengambil alih urusan internal keraton. Kewenangan *Bupati Lebet* juga termasuk mengecek secara berkala keahlian prajurit dan ketersediaan amunisi persenjataan. Masing-masing *Bupati Lebet* disebut *Keparak Kiwa, Keparak Tengen, Gedong Kiwo* dan *Gedong Tengen*. Sedangkan *Bupati Jawi* yang meliputi *Sewu, Bumi, Bumigedhe* serta *Penumping* menangani keamanan dan ketentraman wilayah (urusan eksternal keraton). Nurhajarini, dkk., *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999), hlm. 111-112.

⁴⁵ *Ibid.*,

2. Sistem birokrasi tradisional masa Paku Buwono X

Pada masa Paku Buwono X memerintah sejak naik tahta pada 1893, Kasunanan Surakarta mengalami perombakan birokrasi besar-besaran. Perubahan birokrasi dilakukan guna menyesuaikan dengan zaman serta memaksimalkan pelayanan. Secara bertahap, Paku Buwono X melakukan penataan ulang birokrasi yang ditunjukkan lewat pemisahan antara pemerintahan keraton (*lebet*) dan pemerintahan negara. Untuk mengurus pemerintahan keraton, Paku Buwono X membentuk beberapa lembaga yang dipimpin oleh salah satu *sentana dalem* yang meliputi:

- a. *Reh Kasentanan*, lembaga ini dibentuk untuk mengurus segala keperluan *sentana dalem*. Saat menjalankan tugasnya, para pegawai *Reh Kasentanan* bertanggung jawab kepada *Pangeran Sentana* yang kemudian dilaporkan kepada Raja.
- b. *Reh Kaparentahan Keraton*, bertugas sebagai lembaga penanggung jawab dalam menyelenggarakan dan memastikan kegiatan adat dan budaya berjalan lancar. Selain itu, penyediaan segala perlengkapan keraton juga termasuk tugas lembaga ini.
- c. *Reh Kanayakan*, dibentuk guna mengurus dan mengawasi para *Abdi Dalem Lebet* (Narapraja) bekerja.⁴⁶ Lembaga *Reh Kanayakan* juga membawahi beberapa kantor-kantor, seperti:

⁴⁶ *Abdi Dalem Lebet* adalah penyebutan bagi para pegawai yang bekerja di dalam Keraton.

Kaninten Jawi (badan sandang dan pangan keraton), *Kaninten Lebet* (badan suplai kebutuhan harian) dan *Kaninten Pangrembe* (badan pertanahan dan pajak).

- d. Lembaga kas keraton turut dibentuk guna mengurus finansial istana. Pegawai lembaga kas keraton ini bertanggung jawab kepada *Wedana Bupati Gedong*.
- e. Terakhir, Paku Buwono X juga membentuk lembaga pengawas harta benda milik Kasunanan Surakarta termasuk penanggungjawab renovasi dan pembangunan keraton.

Pada masa Paku Buwono X juga dibentuk Dewan Pertimbangan (*Raad*) yang bertugas sebagai penasihat Raja dan pegawai dalam bekerja. Lembaga ini terbagi atas tiga dewan yang masing masing meliputi:

- a. *Dewan Bale Agung*, dewan ini bertindak sebagai penasihat sekaligus pertimbangan Kasunanan Surakarta. Secara lebih lanjut, kewenangan *Dewan Bale Agung* yakni memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan berkenaan dengan rancangan peraturan yang akan dikeluarkan raja.
- b. *Dewan Keraton*, bertugas mengemukakan usul dan meninjau kembali hasil keputusan *Dewan Bale Agung* serta memberikan pertimbangan lanjutan pada Raja.

- c. *Dewan Kepatihan*, tugas dewan ini yakni menyerahkan semua keputusan yang telah mendapat peninjauan dan diperiksa *Dewan Bale Agung* bersama *Dewan Keraton*.

Pemerintahan Nagari (Kerajaan) juga dibentuk pada masa Paku Buwono X sebagai pelaksana kebijakan Raja. *Pemerintahan Nagari* dipegang oleh seorang Patih yang diberi hak untuk mengatur kerajaan dan menjalin kerjasama dengan pihak luar, seperti Pemerintahan Kolonial dan Mangkunegaran.⁴⁷ Struktur birokrasi *Pemerintahan Nagari* juga turut dibentuk beberapa lembaga guna efisiensi, yakni:

- a. Golongan Sekretariat, tugas dan wewenangnya yaitu mengangkat dan memberhentikan abdi dalem kepatihan.
- b. Golongan Pengelola Keuangan, Bertugas sebagai pengadministrasian keuangan kerajaan serta berkewenangan mengangkat maupun memberhentikan abdi dalem bagian keuangan.
- c. Golongan Pengadilan dan Pemerintahan, sebagai lembaga pengayoman, penjaminan hukum, pendidikan dan kesehatan serta berhak mengangkat maupun memberhentikan abdi dalem *pangreh praja*.

⁴⁷ Peranan Patih sangat sentral di Kasunanan Surakarta. Kedudukan patih dapat disamakan dengan Perdana Menteri saat ini. Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

3. Sistem birokrasi pengaruh kolonial

Masuknya bangsa barat ke Indonesia membawa banyak perubahan. Demikian pula dengan adanya Pemerintah Kolonial Belanda yang menyebabkan terjadinya transformasi dari birokrasi tradisional menjadi birokrasi legal rasional.⁴⁸ Adanya birokrasi kolonial, menyebabkan secara perlahan peranan politik Kasunanan Surakarta menurun. Kedudukan Patih sebagai pemegang *Pemerintahan Nagari* Kasunanan Surakarta berubah menjadi bagian birokrasi kolonial yang diangkat dan diberhentikan lewat sistem kontrak. Dipihak lain, Pemerintah Kolonial juga mendirikan Karesidenan Surakarta yang dipimpin seorang Residen.⁴⁹ Birokratisasi kolonial diperkenalkan sejak 1755 yang bertujuan untuk pengawasan ketentraman dan keamanan pedesaan.⁵⁰

Meskipun demikian, baik birokrasi tradisional maupun birokrasi kolonial keduanya masih tetap berjalan. Hal tersebut dilakukan guna memanfaatkan wibawa penguasa lokal untuk mengatur rakyatnya.⁵¹ Pemanfaatan semacam ini sangat

⁴⁸ Birokrasi legal rasional (*rational legal authority*) diperkenalkan untuk mencoba merombak birokrasi tradisional yang kuno, kaku dan aristokrat. Lebih lanjut lihat pada Hendrikus Triwibawanto Gedeona. (*Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 10, No 2, 2013), hlm. 234-236.

⁴⁹ Karesidenan atau *Regentschappen* adalah pembagian administratif provinsi di Hindia Belanda, dibentuk di daerah berpenduduk padat seperti Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Lihat dalam Suhartono, *op.cit.*, hlm. 73.

⁵⁰ Hal itu dimaksudkan guna mencegah terjadinya pemberontakan seperti Perang Jawa secara lebih lanjut lihat Rheviyany HS Putri. dkk., Dampak Secara Ekonomi Akibat Perang Diponegoro Bagi Belanda. (*Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*: Vol 10, No 6, 2023), hlm. 2982-2986.

⁵¹ Senapas dengan konsep *Keagungbintaraan* dan *Manunggaling Kawula Gusti*. Lihat G Moedjanto, *loc.cit.*

menguntungkan karena dengan mudah kehendak kolonial tercapai dan tak perlu mengeluarkan biaya yang banyak.

2.1.2 Kadipaten Mangkunegaran

A. Stratifikasi Sosial Kadipaten Mangkunegaran

Mangkunegaran merupakan suatu daerah Kadipaten dibawah Kasunanan Surakarta yang sama-sama sebagai wilayah *Vorstenlanden*.⁵² Kadipaten Mangkunegaran dalam menentukan calon Adipati yang akan memimpin, harus mendapat persetujuan Kolonial Belanda dan Paku Buwono di Kasunanan Surakarta.

Kadipaten Mangkunegaran sebagai salah satu pecahan trah Mataram Islam mengikuti pola stratifikasi sosial tradisional. Sebagai salah satu penerus Mataram Islam, Kadipaten Mangkunegaran mengenal dan menerapkan konsep *Manunggaling Kawula Gusti*.⁵³ Konsep yang sama-sama diterapkan oleh penguasa Kasunanan Surakarta.

Bertumpu pada konsep *Manunggaling Kawula Gusti*, tatanan masyarakat Kadipaten Mangkunegaran terbagi kedalam dua kelompok sosial. Dua kelompok sosial tersebut yakni golongan priyayi (*sentana*

⁵² Peristiwa Perjanjian Salatiga (*Kalicacing*) pada 1757 menandai lahirnya Mangkunegaran di bawah kekuasaan Pangeran Sambernyawa (Mangkunegara I). Mangkunegaran dimasukan kedalam kadipaten bawahan Kasunanan Surakarta. Kedudukannya sebagai kadipaten menyebabkan Mangkunegaran tidak diperbolehkan memiliki alun-alun dan tiap Adipati yang memimpin dilarang bertakhta di *Dhampar Kencana* serta tidak memiliki *Bangsal Witana*. Lihat Dhian Lestari Hastuti. dkk., *Indis Style* Sebagai Representasi Kekuasaan Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta. (*Jurnal Gestalt*: Vol 2, No 2, 2020), hlm. 152.

⁵³ Lihat G Moedjanto, *loc.cit*.

dalem) dan *kawula alit* yang memegang peranannya masing-masing. Peranan dari kedua kelas sosial itu didasarkan atas berbagai faktor, termasuk kekayaan, kekuasaan dan kehormatan.⁵⁴ Tatanan masyarakat Mangkunegaran berpandangan, bahwa hubungan penghambaan antara *sentana dalem* dan *kawula alit* telah ditakdirkan. Sehingga hak dan wewenang keduanya saling terpenuhi.⁵⁵

Sentana dalem atau lebih dikenal dengan priyayi mengalami pengklasifikasian lebih lanjut. Adipati menempati kedudukan teratas dalam susunan stratifikasi sosial. Adipati Mangkunegara yang bergelar *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Senopati Ing Ayudha Sudibyaningprang* mendapatkan legitimasi mutlak sebagai pimpinan Kadipaten Mangkunegaran.⁵⁶ Adipati Mangkunegara menempati kedudukan sebagai penguasa puncak piramida sosial di Kadipaten Mangkunegaran bersamaan dengan para *sentana dalem*.

Pembagian strata sosial di Kadipaten Mangkunegaran masih mengikuti pola yang sama dengan Kasunanan Surakarta. Kerabat atau keluarga Adipati yang sedang memimpin berhak menduduki strata tinggi.⁵⁷ Setelah Adipati, Permaisuri menempati lapisan sosial tinggi

⁵⁴ Binti Maunah, *loc.cit.*

⁵⁵ Wasino. *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa Mangkunegaran 1896-1944*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. 39.

⁵⁶ Walaupun hanya sebatas Kadipaten, posisi Adipati Mangkunegara menjelma sebagai raja kecil. Lihat dalam Wasino, *Modernisasi Pemerintahan Praja Mangkunegaran*. (*Jurnal Paramita*: Vol 22, No 1, 2012), hlm. 32.

⁵⁶ Lihat G Moedjanto, *loc.cit.*

⁵⁷ Kerabat Adipati yang sudah tidak berkuasa tetap masuk *kategori sentana dalem*. Namun dengan derajat lebih rendah dibanding kerabat yang sedang berkuasa.

bersama putra dan putrinya. Para putra Adipati kemudian memperoleh gelar Pangeran yang kemudian membedakan hak dan kewajibannya.

Rakyat biasa yang kemudian disebut *kawula alit* dalam tatanan masyarakat Mangkunegaran ditempatkan dalam posisi bawah. *Kawula alit* sering dianggap kelompok kasar dan terbuka sebagai pendukung sekaligus pelayan priyayi. Stratifikasi sosial semacam ini membuat jarak pembeda antara keduanya semakin intensif.

B. Sistem Birokrasi Kadipaten Mangkunegaran

Kadipaten Mangkunegaran melakukan penataan birokrasi secara bertahap sebagai suatu wilayah otonom. Sebagai suatu wilayah sendiri, Kadipaten Mangkunegaran memiliki aparatur sipil dalam menjalankan pemerintahannya. Pada perkembangan awal, Kadipaten Mangkunegaran menganut birokrasi lama peninggalan Mataram Islam. Birokrasi tradisional itu bertahan hingga permulaan abad XIX yang kemudian berkembang menjadi birokrasi legal rasional seiring kolonialisme masuk.⁵⁸

Jalannya birokrasi Kadipaten Mangkunegaran pada awalnya harus mendapatkan persetujuan Kasunanan Surakarta. Adipati Mangkunegara berhak mengangkat pegawai dengan mengajukan persetujuan awal.⁵⁹ Disamping birokrasi tradisional, Kadipaten

⁵⁸ Hendrikus Triwibawanto Gedeona, *loc.cit.*

⁵⁹ Mulanya pengangkatan Adipati Mangkunegara dan pejabat birokrasi harus berdasar pada persetujuan Pemerintah Kolonial dan Kasunanan Surakarta. Kondisi yang demikian membuat Adipati tidak memiliki kekuasaan mutlak yang bebas. Akan tetapi di akhir abad XIX sampai XX ketentuan tersebut tak berlaku lagi. Adipati Mangkunegara hanya wajib mendapat persetujuan

Mangkunegaran menerapkan birokrasi legal rasional yang dibawa Kolonial Belanda. Kondisi yang demikian itu cenderung mengakibatkan tumpang tindih kepentingan.

Adipati Mangkunegara mengontrol dengan tegas semua aparatur pemerintahannya agar hanya patuh kepada Kadipaten Mangkunegaran. Pengontrolan ini guna meminimalisir para pegawai memainkan politik dua kaki dan loyalitas ganda.⁶⁰ Loyalitas kepada Pemerintahan Kolonial hanya dilakukan Adipati Mangkunegara melalui keputusan-keputusannya. Hal itu tercermin dalam setiap keputusan yang diambil selalu menggunakan kalimat “Atas pertimbangan dan persetujuan Residen”.⁶¹

Jabatan Adipati Mangkunegara sebagai pimpinan tertinggi Kadipaten Mangkunegaran dalam dinamikanya dibantu seorang Patih. Pengadaan jabatan Patih diperlukan meskipun Mangkunegaran hanya sebatas Kadipaten. Patih Mangkunegaran hanya sekadar sebagai pembantu Adipati dalam bertugas dan tak memainkan peranan politik. Pembagian tugas semacam ini berbanding terbalik dengan Kasunanan Surakarta.⁶²

Pemerintah Kolonial lewat Residen Surakarta tersedia dalam <https://puromangkunegaran.com/tata-pemerintahan-mangkunegaran/>. Diakses pada 3 Februari 2024 pukul 11.14 WIB.

⁶⁰ Pengontrolan ini dilakukan Adipati Mangkunegara melalui penempatan posisi strategis kepada orang-orang yang dipercayainya. Dengan demikian, permainan politik dengan Pemerintah Kolonial maupun Kasunanan Surakarta yang dilakukan pegawai dapat dicegah. Dibahas lebih lanjut dalam Wasino, *op.cit.*, hlm. 31.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Kedudukan Patih di Kasunanan Surakarta diperbolehkan mengambil alih urusan pemerintahan. Kondisi ini mengakibatkan Patih mampu menjalin hubungan dengan pihak luar seperti Pemerintah Kolonial. Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

Patih Kadipaten Mangkunegaran yang penyebutannya dikenal dengan Bupati Patih membawahi lembaga *Priyayi Punggawa*. *Priyayi Punggawa* inilah yang bertugas sebagai pegawai lapangan dan digaji oleh Adipati Mangkunegara. Tugas-tugas yang dibebankan kepada *Priyayi Punggawa* meliputi memungut pajak tanah, menerima keperluan dapur dan sebagainya.⁶³

Kondisi birokrasi Kadipaten Mangkunegaran dalam perkembangannya mengalami perombakan. Perombakan itu ditunjang oleh munculnya modernisasi birokrasi. Pada masa Adipati Mangkunegara IV, Kadipaten Mangkunegaran melakukan reformasi birokrasi. Lembaga-lembaga pemerintahan dibentuk secara lengkap sebagai tindak lanjut pembenahan Mangkunegaran, termasuk memaksimalkan pengelolaan pendapatan Kadipaten Mangkunegaran.⁶⁴ Lembaga yang dibentuk itu disebut *Kawedanan* dan atas naungan seorang Wedana. Lingkup kerja masing-masing *Kawedanan* yang telah dibentuk dibagi menjadi dua bagian, yakni lembaga urusan dalam negeri dan urusan luar negeri.⁶⁵ Berikut penjabaran tugas masing-

⁶³ Lembaga *Priyayi Punggawa* terdiri dari dua orang Lurah dan dua Bekel. Masing-masing Lurah dan Bekel dibantu 14 Jajar. Lihat Wasino, *loc.cit.*

⁶⁴ Modernisasi birokrasi dan memaksimalkan pengelolaan pendapatan dilakukan Adipati Mangkunegara IV. Salah satu cara Adipati Mangkunegara IV memaksimalkan pendapatan Mangkunegaran, yakni melalui penarikan tanah-tanah lungguh dan pemberhentian sistem apanage. Sebagai gantinya, Adipati Mangkunegaran mengganti sistem apanage dengan sistem bayar upah sesuai luas dan kualitas tanah. Tanah-tanah lungguh tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai ladang usaha milik Mangkunegaran. Misalnya saja, tanah lungguh itu dimanfaatkan untuk industri Pabrik Gula Colomadu dan Tasikmadu. Secara lebih lanjut lihat Rantikah, *Dinamika Pabrik Gula Tasikmadu di Mangkunegaran Tahun 1917-1935. (Mozaik: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah, Vol 12, No 2, 2021)*, hlm. 115-117.

⁶⁵ Pola pemisahan ini mengikuti model pembagian birokrasi Mataram Islam, suatu pola yang sama-sama diterapkan oleh Kasunanan Surakarta. Wasino, *op.cit.*, hlm. 81.

masing *Kawedanan* yang dibentuk Adipati Mangkunegara IV, yakni sebagai berikut.

1. *Reh Jaba* atau *Jawi*

Adipati Mangkunegara IV membentuk *Reh Jaba* atau *Jawi* untuk mengambil alih urusan luar negeri Kadipaten Mangkunegaran.⁶⁶ Dalam prakteknya, *Reh Jaba* hanya terdiri atas *Kawedanan Reksapraja* yang membawahi tiga *Kemantren* dan dipimpin seorang *Wedana*. *Wedana* menjalankan tugasnya atas pengangkatan dan pemberhentian dari Adipati Mangkunegara dan bertanggung jawab penuh. Berikut *Kemantren* dibawah pengawasan *Wedana Reksapraja*, yakni:⁶⁷

- a. *Margatama*, *Kemantren* ini dibentuk untuk merespon pemenuhan fasilitas publik yang diperlukan Kadipaten Mangkunegaran. Beberapa contoh tugas *Kemantren Margatama* adalah penyediaan air bersih, pengelolaan sarana irigasi, pemeliharaan jalan dan sebagainya.
- b. *Jaksa*, bertugas sebagai badan yang mengurus dan menjamin penegakan hukum serta konstitusi. *Kemantren Jaksa* menjalin hubungan sinergitas dengan badan lain, yakni *Kemantren Polisi*.

⁶⁶ Kata *Jaba* berasal dari Bahasa Jawa yang artinya luar, penyebutan kata *Jaba* yakni *Njobo*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Jawa – Bahasa Indonesia I* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993), hlm. 315.

⁶⁷ Wasino, *op.cit.*, hlm. 81-8.

c. *Polisi, Kemantren* ini didirikan sebagai badan urusan ketertiban dan keamanan. *Kemantren Polisi* berkewenangan menerima laporan perkara dari rakyat yang kemudian dilimpahkan kepada *Kemantren Jaksa* untuk diproses. Selain itu, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Kadipaten Mangkunegaran juga menjadi tugasnya, sebagai upaya menyukseskan *titah* Adipati.

2. *Reh Jero* atau *Lebet*

Reh Jero dibentuk untuk mengambil alih urusan dalam negeri Kadipaten Mangkunegaran. Kata *Jero* berasal dari Bahasa Jawa yang artinya dalam. *Reh Jero* terdiri atas delapan *Kawedanan*, masing-masing dipimpin oleh *Wedana* yang meliputi:⁶⁸

- a. *Kawedanan Hamongpraja*, dibentuk untuk mewadahi tiga *Kemantren* dan dikepalai seorang *wedana*, meliputi *Kemantren Sastralukito* (badan pencatat dan penghitung), *Kemantren Reksapustoko* (bertugas dalam pengelolaan arsip surat serta dokumen berharga) dan *Kemantren Pamongsiswo* (*badan pengembangan kesenian dan kesusasteraan gaya Mangkunegaran*).
- b. *Kawedanan Martapraja*, terdiri atas satu *Kemantren* saja yakni *Kemantren Reksahardana* (*badan keuangan Mangkunegaran*).

⁶⁸ Lihat Wasino, *loc.cit.*

- c. *Kawedanan Kartapraja*, menaungi dua *Kemantren* yakni *Kemantren Kartahusada* (badan usaha milik Kadipaten Mangkunegaran) dan *Kemantren Martanimpuna* (badan penerima pajak).
- d. *Kawedanan Kartipraja*, Terdiri atas satu badan saja yakni *Kemantren Kartapura* (mengurus perbaikan dalam dan luar kota serta menjadi badan penanggulangan bencana kebakaran)
- e. *Kawedanan Yogiswara*, Membawahi empat *Kemantren* yang meliputi *Kemantren Ngulama* (terdiri atas pemuka agama islam yang bertugas untuk berdoa demi kententraman), *Kemantren Ketib* (mengambil alih urusan pernikahan dan mengurus jenazah), *Kemantren Mardikan* (mengambil urusan syiar agama Islam dan juru pelihara tempat ibadah) dan *Kemantren Naib* (berkewenangan atas urusan perceraian rumah tangga).
- f. *Kawedanan Reksawibawa*, terdiri atas *Kemantren Reksawarasta* (bertugas dalam perawatan persenjataan prajurit), *Kemantren Reksasawahana* (pemeliharaan seluruh kendaraan dan penyediaan suku cadang), *Kemantren Reksa Busana* (penyediaan seragam prajurit) serta *Kemantren Langenpraja* (merawat semua peralatan budaya seperti gamelan, wayang dan sebagainya).

- g. *Kawedanan Purbabaksana*, meliputi *Kemantren Reksabaksana* (menyuplai kebutuhan bahan pangan), *Kemantren Wreksapandaya* (penanaman jati guna penyediaan kayu untuk bahan bangunan) dan *Kemantren Tarulata* (bertugas untuk membagi penyerahan rumput dan padi).⁶⁹
- h. *Kawedanan Mandrapura*, membawahi empat urusan yakni *Kemantren Mandrasana* (perawatan dan pembersihan perkakas), *Kemantren Reksapradipta* (menyalakan lampu penerangan disemua wilayah), *Kemantren Subapandaya* (penyediaan air minum) dan *Kemantren Reksasungata* (menyediakan hidangan makanan pura).

Kondisi birokrasi Kadipaten Mangkunegaran masa Adipati Mangkunegara IV itu selanjutnya mengalami pembaruan-pembaruan lanjutan. Pada masa Adipati Mangkunegara VII menjabat, susunan birokrasi dilakukan perombakan ulang. Perubahan birokrasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi Hindia Belanda dan perkembangan zaman.⁷⁰ Perubahan-perubahan birokrasi itu, yakni sebagai berikut.

⁶⁹ *Kemantren Wreksapandaya* membawahi seorang *Blandong*. *Blandong* merupakan sebutan bagi orang yang berprofesi sebagai penebang kayu. Lihat Fitriyah Nurul Faizah dan Ekna Satriyati, Hubungan Patron Klien Blandong dengan Mandor Hutan. (*Dialektika Masyarakat Jurnal Sosiologi*: Vol 2, No 2, 2018), hlm. 50-51.

⁷⁰ Pada permulaan abad 20, jalannya birokrasi Kadipaten Mangkunegaran dituntut untuk lebih cepat dan efisien. Hal itu sejalan dengan prinsip Desentralisasi yang dijalankan Pemerintah Kolonial. Hal itu dimanfaatkan Adipati Mangkunegara VII untuk melakukan pembaruan-pembaruan.

- a. Pembagian birokrasi yang sebelumnya terdiri atas *Reh Jaba* dan *Reh Jero* ditiadakan oleh Adipati Mangkunegara VII.
- b. Penyebutan untuk lembaga urusan di Kadipaten Mangkunegaran yang semula bernama *Kawedanan* diganti *Kabupaten*.⁷¹
- c. Pembubaran beberapa *Kawedanan* yang dianggap usang dilakukan Adipati Mangkunegara VII. *Kawedanan* tersebut adalah *Kawedanan Reksapraja*, *Kawedanan Mandrapura*, *Kawedanan Martapraja*, *Kawedanan Reksawibawa* dan *Kawedanan Purbaksana*. Penghapusan beberapa *Kawedanan* tersebut juga diikuti pembentukan *Kabupaten-Kabupaten* baru.⁷² *Kabupaten* bentukan baru itu meliputi *Kabupaten Parimpuna* (pengelolaan atas pasar-pasar diwilayah Mangkunegaran), *Kabupaten Sindumarto* (menangani pengairan irigasi), *Kabupaten Pangreh Praja* (menaungi pegawai pemda serta aparat kepolisian), *Kabupaten Sinatriya* (bertugas melayani para *sentana dalem*), *Kabupaten Wanamarta* (pengelolaan hutan), *Kabupaten Paprentahan Pajeg Siti* (mengatur regulasi perpajakan), *Kabupaten Kaprentahan Kedokteran* (petugas kesehatan pegawai dan *sentana dalem*), *Kabupaten Martanimpuna* (berwenang

⁷¹ Pergantian ini juga mendasari penyebutan *Wedana* menjadi *Bupati*.

⁷² Kabupaten baru bentukan Adipati Mangkunegara VII hasil pembaruan dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan Kadipaten Mangkunegaran.

menerima pendapatan pajak dan pendapatan luar biasa), *Kabupaten Natapraja* (sekretariat Mangkunegaran) serta *Kabupaten Pasinaon Dusun* (meningkatkan kualitas sekolah desa).

- d. Peningkatan fungsi dan wewenang beberapa *Kabupaten* juga dilakukan oleh Adipati Mangkunegara VII. *Kawedanan Hamongpraja* yang semula hanya badan pencatatan, dinaikan menjadi *central government*.⁷³

2.2 Kondisi Politik

2.2.1 Kasunanan Surakarta

A. Suksesi Kepemimpinan dan Pergolakan *Sentana Dalem*

Runtuhnya Pemerintah Kolonial Belanda pasca penyerahan tanpa syarat kepada Jepang, mengawali penjajahan Jepang di Indonesia.⁷⁴

Pada masa pendudukan Jepang, Kasunanan Surakarta mendapatkan posisi strategis bersama dengan Kerajaan Jawa lainnya.⁷⁵ Oleh karena itu, Kasunanan Surakarta dikukuhkan sebagai *Kochi*.

Kasunanan Surakarta saat itu dipimpin oleh Paku Buwono XI yang merupakan anak Paku Buwono X. Masa kepemimpinan Paku

⁷³ *Central government* merupakan tempat teratas semua aktivitas birokrasi dijalankan. Selaku *central government*, Kabupaten Hamongpraja memiliki kantor yang merangkap sebagai tempat Patih berdinan. Dimuat dalam Wasino, *op.cit.*, hlm. 89.

⁷⁴ Selengkapnya dalam <https://tirto.id/sejarah-perjanjian-kalijati-latar-belakang-isi-tokoh-delegasi-f9mo>. Diakses pada 18 Februari 2024 pukul 19.13 WIB.

⁷⁵ Kerajaan Jawa adalah sebutan bagi Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaran dan Paku Alaman. Djoko Suryo, *loc.cit* dan Kris Hapsari, Kasunanan dan Mangkunegaran di Tengah Pendudukan Jepang. (*Jurnal Indonesian Historical Studies*: Vol 2, No 1, 2018), hlm. 39.

Buwono XI tergolong singkat, yakni selama 6 tahun. Mangkatnya Paku Buwono XI tanpa meninggalkan wasiat apapun membuat *sentana dalem* bergejolak. Saat suasana berkabung itu, terjadi perbedaan pendapat tentang penerus tahta Kasunanan Surakarta.⁷⁶ Perbedaan pendapat menyebabkan *sentana dalem* terbelah menjadi dua kubu yakni kubu *Paugeran* dan kubu opsional.

Menurut *Paugeran*, penerus calon Raja berikutnya haruslah anak laki-laki tertua dari Prameswari Dalem. Pada prinsipnya Paku Buwono XI memiliki dua orang anak laki-laki, yakni BRM Saliman serta BRM Suryo Guritno. Keduanya bergelar Pangeran dan tidak diangkat menjadi Putra Mahkota.⁷⁷ Berbagai pertimbangan lanjutan menyodorkan nama BRM Suryo Guritno sebagai penerus takhta Kasunanan Surakarta. Tanda tanya tentang penerus takhta Kasunanan Surakarta semakin terjawab saat pemakaman Paku Buwono XI di Pajimatan Imogiri. Sesuai tradisi, calon pengganti Raja dilarang menghadiri prosesi pemakaman.⁷⁸ Hal itu didasarkan pada adat istiadat Mataram Islam yang masih dipertahankan Kasunanan Surakarta.

Posisi kedudukan raja yang jatuh kepada BRM Suryo Guritno memicu perdebatan. Sebagian pejabat senior dan *sentana dalem* tidak

⁷⁶ Paku Buwono XI atau Raden Mas Ontoseno wafat pada 1 Juni 1945. Semasa memerintah, Paku Buwono XI mengangkat dua orang Prameswari Dalem yakni GKR. Kencana dan GKR. Paku Buwono. Masing-masing dari mereka melahirkan anak laki-laki, kondisi inilah yang kemudian memunculkan spekulasi penerus tahta.

⁷⁷ Putra Mahkota adalah calon penerus tahta dengan gelar lengkap *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Nagara Raja Putra Mataram*. Darsiti Soeratman, *op.cit.*, hlm. 61.

⁷⁸ Bram Setiadi, dkk., *op.cit.*, hlm. 84.

menghendaki seorang raja yang masih sangat muda dan tidak cakap politik. Sementara itu, Pemerintahan Jepang menolak rencana *Jumenengan* dan tak menjamin keselamatan BRM Suryo Guritno.⁷⁹ Meskipun dengan berbagai penolakan, prosesi *Jumenengan* tetap dilaksanakan.

Pada 12 Juli 1945 atau 2 Ruwah 1876 Ehe, BRM Suryo Guritno secara resmi dinobatkan menjadi Paku Buwono XII di Bangsal Manguntur Tangkil. Lewat prosesi *Jumenengan* ini, BRM Suryo Guritno yang masih berusia 20 tahun berhak menyandang gelar *Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Paku Buwana Senapati Ing Alaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Inkgang Kaping XII*. Pasca penobatan, Paku Buwono XII harus menghadapi fenomena disintegrasi *sentana dalem*. Bangsawan senior memanfaatkan posisi raja yang masih muda untuk memainkan peranan politik yang lebih luas.⁸⁰ Bangsawan-bangsawan itu kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Diantaranya meliputi: KGPH Hadiwijoyo, GPH Suryohamijoyo, BPH Sumodiningrat serta KRMH Wuryaningrat.⁸¹ Para bangsawan itu kemudian justru lebih dikenal masyarakat karena sering tampil dihadapan publik.

⁷⁹ *Jumenengan* adalah istilah penyebutan bagi upacara penobatan raja. Prosesi *jumenengan* B. R. M Suryo Guritno ditentang *Kooti Jimu Kyoku Tyokan* (Pemerintah Gubernur Jepang).

⁸⁰ Fenomena ini didukung oleh Jepang guna memanfaatkan popularitas para Bangsawan untuk memobilisasi dukungan rakyat. Misalnya saja, BPH Sumodiningrat lebih populer dalam dunia politik daripada Paku Buwono XII. BPH Sumodiningrat merupakan tokoh elit Partai Indonesia Raya sekaligus komandan (*Cudanco Dai-Ichi Daidan*) Bataliyon II/Manahan dalam kesatuan PETA.

⁸¹ Selengkapnya dalam <https://mpn.kominfo.go.id/index.php/2022/01/10/kgph-hadiwijaya-putra-raja-sang-budayawan/>. Diakses pada 20 April 2024 pukul 20.24 WIB

B. Kasunanan Surakarta Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Memasuki fase perjuangan kemerdekaan Indonesia, Kasunanan Surakarta lewat berbagai bidang turut ambil bagian dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berbagai respon dukungan dilakukan Kasunanan Surakarta, meliputi:

1. Bidang Kemiliteran

Pihak Kasunanan Surakarta menyuplai berbagai peralatan perang. Peralatan perang diberikan kepada para pejuang dengan berbagai bentuk, terdiri atas berbagai jenis pucuk senjata api, seragam militer, mobil serta bantuan kuda sebagai salah satu moda transportasi militer saat itu.⁸²

2. Bidang Diplomasi dan Politik

Respon dukungan diplomatis paling awal yang dilakukan Kasunanan Surakarta, yakni mengirimkan delegasi persiapan kemerdekaan Indonesia. Paku Buwono XII mengutus beberapa pihak untuk ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia di Surakarta terbentuk. Pihak Kasunanan Surakarta yang tergabung dalam lembaga PPKI itu antara lain: KRMH Wuryaningrat, Mr. Soekasno, RMT

⁸² Kuda tunggang milik Kasunanan Surakarta disumbangkan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia sebanyak 250 ekor. Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

Brojonagoro, dr. Kartono serta RNg Darmo Pranoto.⁸³ Paku Buwono XII juga mengeluarkan maklumat kedudukan. Maklumat kedudukan dikeluarkan Paku Buwono XII untuk merepon kemerdekaan Indonesia, yang isinya:

Makloemat Sri Padoeka Inggang Sinoehoen Kandjeng Soesoehoenan kepada seloeroeh pendoedoek Negeri Soerakarta Hadiningrat:

1. Kami Pakoe Boewono XII Soesoehoenan Negeri Soerakarta Hadiningrat menjatakan Negeri Soerakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari negara Repoeblik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintah poesat Negara Repoeblik Indonesia.
2. Kami menjatakan pada dasarnja segala kekoekaan dalam daerah Negeri Soerakarta Hadiningrat terletak di tangan Soesoehoenan Soerakarta Hadiningrat dan oleh karena itoe, berhoeboeng dengan keadaan pada dewasa ini, maka kekoekaan-kekoekaan jang sampai kini tidak di tangan kami dengan sendirinja kembali ke tangan kami.
3. Kami menjatakan bahwa perhoeboengan antara Negeri Soerakarta Hadiningrat dengan pemerintah poesat Negara Repoeblik Indonesia bersifat langsoeng.
4. Kami memerintahkan dan pertjaja kepada seloeroeh pendoedoek Negeri Soerakarta Hadiningrat mereka akan bersikap sesoeai dengan sabda kami terseboet di atas.⁸⁴

Lewat maklumat kedudukan, Kasunanan Surakarta menggabungkan diri menjadi bagian dari Republik Indonesia. Langkah Paku Buwono XII dalam mengeluarkan maklumat

⁸³ PPKI di Surakarta terbentuk untuk menampung masukan yang kemudian dilanjutkan kepada PPKI pusat. Kasunanan Surakarta pun mengirimkan utusan di PPKI pusat yaitu KRMT Radjiman Wedyodiningrat dan Soeroso. Pada tanggal 25 Agustus 1945, PPKI diubah menjadi KNIDS (Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta) yang disertai penambahan anggota. Anggota KNIDS meliputi H. Moekti, GPH dr. Mangundiningrat, Suprpto, JJ Kasimo, GPH Suryohamijoyo, Mulyadi Joyomartono, Maladi dan lainnya. Muhammad Akbar Agus Sutanto, *op.cit.*, hlm. 5.

⁸⁴ Maklumat kedudukan Kasunanan Surakarta dikeluarkan Paku Buwono XII tanggal 1 September 1945.

kedudukan, selanjutnya diikuti oleh Kerajaan Jawa lainnya.⁸⁵ Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman selanjutnya juga turut mengeluarkan amanat 5 September 1945 yang isinya menggabungkan diri kedalam Republik Indonesia

Selain mendukung dibidang diplomasi, Paku Buwono XII sebagai pemimpin tertinggi Kasunanan Surakarta juga tampil di garis depan perjuangan. Selama perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Paku Buwono XII beberapa kali mendampingi Presiden Soekarno berkunjung di front-front pertempuran.⁸⁶

3. Bidang Logistik

Sokongan logistik Kasunanan Surakarta kepada para pejuang terus digelontorkan. Aset Kasunanan Surakarta seperti kuda, mobil, peralatan makan, uang dan sebagainya turut disumbangkan. Disamping pemberian logistik, Kasunanan Surakarta juga meminjamkan beberapa aset tambahan. Bahkan sampai perekonomian Indonesia stabil, aset yang dipinjamkan tidak diminta untuk dikembalikan. Semua harta benda milik Kasunanan Surakarta dihibahkan untuk kepentingan perjuangan Indonesia.

⁸⁵ Djoko Suryo, *loc.cit.*

⁸⁶ Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

2.2.2 Kadipaten Mangkunegaran

A. Suksesi Kepemimpinan

Sama halnya dengan Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran juga dikukuhkan sebagai *Kochi*. Melalui pengukuhan sebagai *Kochi*, Kadipaten Mangkunegaran berhak mengatur daerahnya sendiri yang mana kedudukan Adipati Mangkunegara VII sebagai pemimpin Kadipaten Mangkunegaran dinobatkan menjadi Mangkunegaran *Koo*.

Adipati Mangkunegara VII atau Raden Mas Soerjosoeparto adalah seorang pemimpin Kadipaten Mangkunegaran yang progresif dan visioner. Banyak pembaruan-pembaruan yang dilakukan Adipati Mangkunegara VII, terlebih dalam birokrasi dan sosial.⁸⁷ Wafatnya Adipati Mangkunegara VII pada 19 Juli 1944 atau 29 Rejeb 1875 Ja, membawa suksesi kepemimpinan segera. Apabila berpaku pada *Paugeran*, penerus tahta Kadipaten Mangkunegaran haruslah anak laki-laki tertua. Oleh karena itu, KPH Hamijaya Sarosa berhak dinobatkan menjadi Adipati berikutnya.

Tepat di hari wafatnya Adipati Mangkunegara VII, KPH Hamijaya Sarosa diangkat menjadi penerus tahta Kadipaten Mangkunegaran. Prosesi *Jumenengan* Adipati Mangkunegara VIII dilakukan di Pura Mangkunegaran didampingi *Saiko Sikikan* (Pemerintahan Jepang). Karena pendudukan Jepang di Indonesia

⁸⁷ Wasino, *loc.cit.*

turut mengawasi kehidupan dalam negeri Kerajaan Jawa.⁸⁸ Hal itu demi ketertiban dan keamanan dalam negeri.

B. Kadipaten Mangkunegaran Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Kadipaten Mangkunegaran turut merespon gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adipati Mangkunegaran VIII yang baru saja dinobatkan langsung memberikan dukungan, meliputi:

1. Bidang Kemiliteran

Adipati Mangkunegara VIII memberikan berbagai peralatan perang. Peralatan-peralatan perang tersebut digunakan untuk keperluan persenjataan para pejuang.⁸⁹

2. Bidang Diplomasi

Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menyebar ke daerah-daerah, mendapatkan respon Kadipaten Mangkunegaran. Bukti dukungan pihak Kadipaten Mangkunegaran terhadap kemerdekaan Indonesia, ditunjukkan lewat maklumat kedudukan yang dikeluarkan Adipati Mangkunegara VIII. Isi dari maklumat kedudukan tersebut yaitu:

Atas nama rakjat dan keloearga Mangkoenegaran kami,
Mangkoenagoro VIII. Kepala Keradjaan Mangkoenagaran:

⁸⁸ Kependudukan Jepang di Indonesia banyak mempengaruhi urusan internal Kadipaten Mangkunegaran. Pemerintahan Jepang membatasi hegemoni kekuatan feodalisme Mangkunegaran. Setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, harus mendapatkan persetujuan Jepang. Begitu pula para *kawula alit* ikut diatur dan diawasi pergerakannya. Lihat dalam surat kabar *Waspada* edisi 27 Juli 2002.

⁸⁹ Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

1. Bahwa Keradjaan Mangkoenagaran soeatoe daerah istimewa dari pada Negara Repoeblik Indonesia.
2. Bahwa semoea oeroesan pemerintahan dalam Keradjaan Mangkoenagaran kini ditetapkan dan dipimpin oleh Pemerintah Mangkoenagaran sendiri dengan mengingat peratoeran Pemerintah Repoeblik Indonesia.
3. Bahwa perhoeboengan Pemerintah Keradjaan Mangkoenagaran dengan Pemerintah Repoeblik Indonesia bersifat langsoeng.

Kami perintahkan kepada semoea pendoedoek seloeroeh Keradjaan Mangkoenagaran soepaja memperhatikan dan mengindahkan semoea atoeran jang kami tetapkan.⁹⁰

Maklumat kedudukan itu dikeluarkan secara bersamaan dengan Kasunanan Surakarta. Adipati Mangkunegara VIII bahkan lebih lanjut, memerintahkan kepada *kawula alit* Mangkunegaran untuk solid bekerja sama dengan *kawula alit* Kasunanan Surakarta dalam menyikapi kemerdekaan Indonesia. Hal ini tecermin melalui Maklumat lanjutan Adipati Mangkunegara VIII, yang isinya:

Kami, Mangkoenagoro VIII. Setelah mendengar sabda Seri Padoeka Inkgang Sinoehoen Kangdjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono XII kepada pisowanan para Boepati, jang mengandjoerkan bekerdja bersama-sama antara Pemerintah Kasoenanan dengan Pemerintah Mangkoenagaran.

Mendjoendjoeng tinggi sabda Seri Padoeka Inkgang Sinoehoen Kangdjeng Soesoehoenan jang mengandoeng maksoed jang soetji itoe.

Mengingat, bahwa maksoed itoe sesoeai benar dengan perasaan dan hasrat Kami.

Mengoemoemkan:

Kepada seloeroeh rakjat, keloearga dan pegawai Mangkoenagaran, soepaja bersikap dan bertindak lebih erat dan njata kearah bekerdja bersama-sama antara Pemerintah Negeri Mangkoenagaran dan Pemerintah Kasoenanan.⁹¹

⁹⁰ Maklumat kedudukan Adipati Mangkunegara VIII dikeluarkan tanggal 1 September 1945 melalui *Pepatih Dalem* Partono Handoyonoto. Surat kabar *Poestaka Warti Pradja Mangkoenagaran* edisi 20 Desember 1945.

⁹¹ Maklumat susulan diumumkan *Pepatih Dalem* Partono Handoyonoto tanggal 1 November 1945. *Ibid.*,

Maklumat kedua itu dikeluarkan Adipati Mangkunegara VIII guna membangun rasa solidaritas antar masyarakat Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Solidaritas yang dimaksud yakni bersatu dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia yang baru saja dikumandangkan.

2.2.3 Pemberlakuan Daerah Istimewa Surakarta (DIS)

Terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta atau DIS didasarkan atas berbagai pertimbangan. Pemerintah Indonesia memandang perlu memberikan swapraja kepada Surakarta yang di dalamnya meliputi Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Pasca proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, tepat sehari kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Soekarno tanggal 19 Agustus 1945. Surat ini kemudian diberikan kepada Paku Buwono XII sebagai pemimpin Kasunanan Surakarta dan Adipati Mangkunegara VIII selaku pemimpin Kadipaten Mangkunegaran. Adapun isi Surat Keputusan Presiden Soekarno kepada Paku Buwono XII yakni sebagai berikut:

Kami, Presiden Republik Indonesia menetapkan:
Ingkang Sinoehoen Kandjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono Senopati Ing Ngalogo Abdoerrahman Sajidin Panotogomo Ingkang Kaping XII Ing Soerakarta Hadiningrat. Pada kedoedoekannya dengan kepertjajaan bahwa Seri Padoeka Kandjeng Soesoehoenan akan mentjurahan segala fikiran, tenaga, djiwa dan raga oentoek

keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian daripada Repoeblik Indonesia.⁹²

Untuk menyatukan tekad kedua penguasa tradisional di Surakarta Presiden Soekarno juga memberikan Surat Keputusan secara khusus kepada Adipati Mangkunegara VIII, yang isinya:

Kami, Presiden Republik Indonesia menetapkan:
Kandjeng Goesti Pangeran Adipati Arjo Mangkoenagoro Ingkang Kaping VIII. Pada kedoedoekannya dengan kepertjajaan, bahwa Seri Padoeka Kandjeng Goesti akan mentjuraikan segala fikiran, tenaga, djiwa dan raga oentoek keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian daripada Repoeblik Indonesia.⁹³

Pemberian hak istimewa itu didasarkan atas pertimbangan bahwa Kasunanan Surakarta bersama Kadipaten Mangkunegaran berperan aktif pada masa pergerakan nasional. Organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam mendapat dukungan penuh dari Kasunanan Surakarta.⁹⁴ Berhubung keadaan Pemerintah Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan sangat sibuk, maka regulasi yang mengatur kedudukan hak istimewa belum sempat dicanangkan.⁹⁵ Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia secara implisit menjelaskan kedudukan Surakarta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, antara lain berbunyi sebagai berikut.

Komite Nasional Daerah diadakan di Jawa dan Madura (kecuali di Daerah Istimewa Jogjakarta dan Surakarta) di Karesidenan, di kota

⁹² Surat Keputusan Presiden Soekarno tersebut dikeluarkan jauh sebelum Paku Buwono XII mengeluarkan Maklumat Kedudukan. Lihat Purwadadi & Djoko Dwiyanto, *Kraton Surakarta: Sejarah, Pemerintahan, Konstitusi, Kesusasteraan dan Kebudayaan*. (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008), hlm. 805.

⁹³ Ni'matul Huda, *Kajian Terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta*. (Bandung: Nusamedia), hlm. 9.

⁹⁴ Sutyono., dkk. *Daerah Istimewa Surakarta*. (Yogyakarta: Putra Bangsa, 2004), hlm. 23-45.

⁹⁵ Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm. 52.

berotonomi, kabupaten dan lain-lain daerah yang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri.⁹⁶

Peraturan tersebut memberikan gambaran bahwa Surakarta merupakan daerah yang dibedakan dengan daerah lain, dimana Surakarta dijadikan sebuah residen yang memiliki karakteristik berbeda. Ditengah regulasi hak istimewa bagi Surakarta yang belum jelas, justru muncul perbedaan pendapat dikalangan penguasa Surakarta itu sendiri yakni Paku Buwono XII dan Adipati Mangkunegara VIII. Kedua pihak tidak mau bekerja sama dan masing-masing menganggap kedudukannya setara. Oleh sebab itu Adipati Mangkunegara VIII tidak pernah bersedia menjadi wakil Paku Buwono XII dan berkeinginan meminta Swapraja Mangkunegaran yang independent.⁹⁷

Adanya Swapraja Surakarta juga mengakibatkan masyarakat terbelah dalam menyikapi Swapraja Surakarta. Masyarakat terbagi ke dalam dua kubu, yakni kelompok pro dan kelompok kontra. Perbedaan pendapat itu kemudian memunculkan pergesekan-pergesekan yang memicu konflik. Konflik-konflik yang terjadi sepanjang pemberlakuan DIS kemudian dikenal dengan Gerakan Anti Swapraja, sebuah gerakan yang diinisiasi kelompok oposisi pemerintah.

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.

⁹⁷ Kondisi ini dimanfaatkan kelompok oposisi untuk memperburuk keadaan Surakarta dengan menggalang dukungan masyarakat untuk menolak pemberlakuan Daerah Istimewa Surakarta. Lihat dalam Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 448-449.